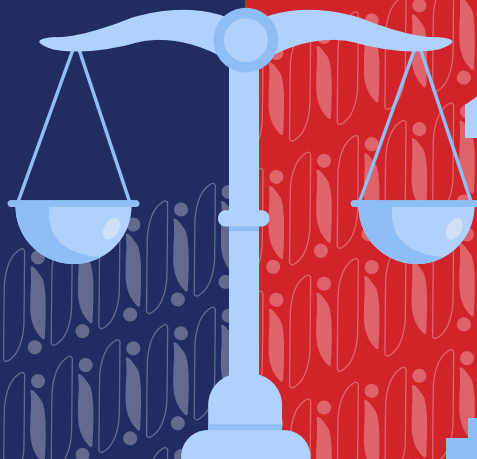


Buletin AIPJ3

Edisi 2 | NOVEMBER 2025



Kepemimpinan Perempuan dalam Peradilan

Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Representasi dan Kepemimpinan Perempuan di Peradilan

Indonesia tidak sendirian dalam upaya meningkatkan peluang kepemimpinan dan keterlibatan hakim perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Australia juga memiliki tujuan dan tantangan serupa.

Yang Mulia Debra Mortimer, hakim agung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Federal Australia, menyampaikan dalam sesi webinar bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 29 September 2025 bahwa meskipun hakim perempuan merupakan mayoritas di banyak pengadilan di tingkat negara bagian Australia, representasi mereka menurun di pengadilan yang lebih tinggi. Di Pengadilan Federal Australia, hakim perempuan mewakili sekitar 34% (atau 21 dari 61 hakim). Sementara di *High Court*, lembaga hukum tertinggi di Australia terdapat tiga hakim perempuan dari total tujuh hakim di November 2025.

Yang Mulia Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menyuarakan kekhawatiran serupa. Beliau menegaskan kembali dukungan kuat Mahkamah Agung dan IKAHI untuk Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), dalam pidato pembukaannya:

“Seiring meningkatnya tuntutan publik akan integritas, transparansi, dan akuntabilitas peradilan, kepemimpinan yang tangguh, visioner, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang

[Bersambung ke hal.2](#)

Jalan Kepemimpinan Hakim Perempuan Indonesia

Selama lebih dari dua dekade, Hakim Agung Nani Indrawati mengalami pasang surut mencapai posisi kepemimpinan. Melalui semua itu, ia melakoni perjalanan menuju kepemimpinan peradilan dengan jauh dari keluarga.

“Saya mencari jalan untuk menyeimbangkan karier dan keluarga. Ada *trial and error*, standar ganda, dan tekanan. Tidak mudah hidup jauh dari keluarga. Namun, saya berpegang teguh pada prinsip kita harus hidup dengan integritas dan tidak mengorbankan karier maupun keluarga,” ujarnya.

Kini menjabat sebagai Ketua Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), Yang Mulia Dr. Nani Indrawati S.H., M.H menegaskan bahwa tidak boleh ada hakim perempuan yang merasa sendirian dalam mengembangkan profesi mereka. Di saat yang sama, ia juga berharap agar semua hakim perempuan bisa menikmati hidup berkualitas bersama keluarga.

Pada Selasa, 23 September 2025, bersama anggota dewan BPHPI dan beberapa hakim perempuan sebagai calon mentor, ia bertemu dengan Hakim Agung Suzanne Christie dari Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), yang sudah bekerja sama untuk topik ini selama beberapa tahun, untuk membahas usulan inisiatif program *mentoring* hakim perempuan.

Didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3), inisiatif ini dikembangkan dari hasil survei nasional terhadap 690 hakim perempuan dari berbagai tingkat peradilan dan wilayah. Survei ini mencakup aspek integritas profesional, pengembangan karier, dan resiliensi bagi hakim perempuan.

[Bersambung ke hal.2](#)

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF



Ketua Federal Court of Australia Debra Mortimer, Yang Mulia Catherine Button, pimpinan Mahkamah Agung, anggota dewan BPHPI dan tim AIPJ3

semakin beragam sangat dibutuhkan. Kehadiran hakim perempuan di posisi strategis bukan sekedar untuk meningkatkan jumlah atau memenuhi representasi, tetapi untuk menghadirkan karakter kepemimpinan yang khas dan sangat dibutuhkan bagi peradilan.”

Meskipun ada peningkatan, representasi perempuan di tingkat kepemimpinan di Indonesia masih rendah. Yang Mulia Dr. Nani Indrawati S.H., M.H, Ketua BPHPI, melaporkan bahwa per September 2025, total hakim perempuan adalah 31% dari seluruh hakim. Namun di tingkat kepemimpinan, proporsi hakim perempuan masih 27% dari seluruh pimpinan pengadilan. Di tingkat Mahkamah Agung, saat ini ada sembilan hakim agung perempuan dari lima puluh hakim agung.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan proporsi calon hakim perempuan dari 34% pada angkatan 2018-2020 menjadi 41% pada angkatan calon hakim 2024/2025. Menuju 2030, BPHPI berupaya meningkatkan proporsi hakim perempuan yang diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, Ketua Pengadilan Federal Australia Mortimer menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan. Berdasarkan pengalaman Australia, ia merekomendasikan empat langkah utama. Pertama, memastikan rekrutmen dan promosi hakim perempuan yang konsisten ke jenjang pengadilan yang lebih tinggi. Kedua, memperluas keberagaman di antara hakim perempuan agar pengadilan mencerminkan masyarakat yang mereka layani. Ketiga, mendukung hakim perempuan dalam menavigasi dan menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan peran di keluarga. Keempat, menghargai tipe kepemimpinan yang beragam, termasuk kualitas yang dibawa sebagai hakim dan karakter yang khas dalam kepemimpinan di lembaga peradilan.

Sebagai Ketua IKAHI, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum juga mendorong hakim laki-laki untuk berpartisipasi dan berperan aktif: “Kita harus mengubah budaya kerja di mana bias gender sering terjadi tanpa disadari, baik dalam ucapan, sikap, maupun kebijakan. Hakim laki-laki berperan penting dalam memberi contoh dan menolak semua bentuk diskriminasi untuk menciptakan budaya kerja yang benar-benar aman dan adil bagi semua pihak.”

JALAN KEPEMIMPINAN HAKIM PEREMPUAN

Inisiatif ini bertujuan untuk membangun masa depan di mana hakim perempuan berbakat dapat memimpin dan berkembang di peradilan Indonesia. “Dengan mendukung hakim perempuan untuk memimpin, kami berupaya mewujudkan kesetaraan gender yang nyata dan akan bermanfaat bagi generasi mendatang. FCFCOA sangat antusias untuk terlibat dalam inisiatif ini. Indonesia dan Australia menghadapi tantangan serupa untuk mempertahankan hakim perempuan berbakat. Mendukung mereka dalam peran kepemimpinan sehingga mencapai kesetaraan gender adalah sangat penting,” ujar Yang Mulia Suzanne Christie di forum tersebut.



Yang Mulia Suzanne Christie (FCFCOA, kiri) dan Yang Mulia Dr. Nani Indrawati S.H., M.H, Ketua BPHPI (kanan)

Hingga Oktober 2025, terdapat sembilan hakim agung perempuan di Mahkamah Agung Indonesia. Ini termasuk dua hakim agung perempuan yang diangkat untuk Kamar Agama Mahkamah Agung (Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.), sebuah pencapaian yang luar biasa dalam sejarah Mahkamah Agung. Dalam kesempatan yang sama, Kamar Tata Usaha juga telah mengangkat Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. sebagai hakim agung.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sepenuhnya mendukung inisiatif pendampingan ini, yang mendorong para hakim perempuan untuk lebih siap memimpin dan memperkuat lembaga peradilan melalui kepemimpinan yang inklusif dan responsif.

Pentingnya Kebijakan Pemantauan Sidang Tertutup dalam Perkara Perempuan dan Anak

Maraknya seruan *no viral, no justice* mencerminkan tingkat frustrasi publik dalam menyikapi penegakan hukum yang tidak setara, serta persepsi bahwa keadilan hanya terwujud ketika sebuah kasus menjadi viral. Hal ini menggarisbawahi pentingnya proses penegakan hukum - baik dalam sidang terbuka dan tertutup - berjalan objektif dan adil bagi semua pihak, khususnya ketika melibatkan perempuan dan anak.

Sebagai lembaga pengawas peradilan eksternal, Komisi Yudisial berperan penting dalam menjalankan pemantauan persidangan agar hak-hak dan perlindungan bagi kelompok rentan terpenuhi. Secara internal, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab atas pengawasan persidangan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pada 26 Februari 2025, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung no 7/TUAKA.WAS/PW14/II/2025 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bisa melakukan pemantauan langsung di persidangan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

“Pemantauan persidangan tidak ditujukan untuk mengintervensi hakim maupun mencari kekurangan dalam proses persidangan, tetapi sebagai upaya untuk memastikan agar persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” jelas anggota Komisi Yudisial Joko Sasmito dalam [pembukaan lokakarya pada Selasa, 8 Oktober 2025 di Jakarta](#).



Pimpinan dan tim Komisi Yudisial bersama perwakilan dari Mahkamah Agung, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam sebuah lokakarya pada tanggal 28 Oktober 2025

Sepanjang 2025, Komisi Yudisial telah melakukan 70 pemantauan sidang tertutup untuk merespon keadaan darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam perjalanannya, Komisi Yudisial seringkali tidak dapat melakukan pengawasan sidang tertutup karena individual hakim memiliki interpretasi yang berbeda.

“Urgensi pemantauan persidangan tertutup bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum ini sangat penting bagi Komisi Yudisial dalam rangka menjamin hak-hak mereka di hadapan hukum,” tutur Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial.

Didukung oleh AIPJ3, Komisi Yudisial menjalankan serangkaian lokakarya dan diskusi terbatas dengan masyarakat sipil pemantau persidangan tertutup di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur sepanjang Agustus-November 2025.

Komisi Yudisial juga mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan kebijakan internal yang lebih kuat dalam memastikan akses Komisi Yudisial untuk menjalankan pemantauan sidang tertutup yang melibatkan perempuan dan anak. Hingga November 2025, proses kebijakan internal ini telah bergulir dalam pembahasan di Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Proses ini diupayakan agar mewujudkan kesepakatan antar kedua lembaga dalam waktu dekat.



Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas Hendra Wahanu Prabandani membuka pertemuan

Mendorong Kemajuan Pembangunan Nasional melalui Pemantauan dan Evaluasi

Melalui komitmen kuat untuk mendorong pembangunan sistem hukum nasional melalui AIPJ3, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengundang sembilan Kementerian/Lembaga dalam pertemuan pemantauan dan evaluasi triwulan III di Jakarta, 17 November 2025.

Sebagai penerima *bridging fund*, masing-masing Kementerian/Lembaga mempresentasikan kemajuan dan capaian sepanjang triwulan ketiga. Bappenas juga mempresentasikan alur pemantauan yang terstruktur dan berkelanjutan, yang membantu kemitraan untuk mengidentifikasi capaian, mengatasi tantangan secara tepat waktu, dan memastikan efektivitas sumber daya agar dapat menghasilkan keluaran berkualitas. Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya laporan BAST (Berita Acara Serah Terima) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, *due diligence*, dan keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional.

Riset Wahid Foundation Soroti Upaya Daerah Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2025-2029, Wahid Foundation melakukan riset untuk mendokumentasikan kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan RAN PE.

Sebagai bagian dari proses pengumpulan data, dan dengan dukungan AIPJ3, Wahid Foundation menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun pada 31 Oktober 2025, yang mempertemukan 27 perwakilan dari pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah serta organisasi masyarakat sipil. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga berpartisipasi dalam dialog tersebut.



Aang Witarsa Rofik, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri

"Banyak daerah, yang meskipun belum menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD PE) secara resmi, telah lebih dahulu mengimplementasikannya dalam praktik. Tantangan ke depan adalah memperkuat koordinasi lintas instansi, memperjelas pembagian tugas dan fungsi, mengoptimalkan manajemen data antar pihak, serta memastikan pengarusutamaan kesetaraan gender dalam pelaksanaan kebijakan," ujar Aang Witarsa Rofik, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri.



Dionnisius Elvan Swasono, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT

Dionnisius Elvan Swasono, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, menyoroti momentum yang semakin meningkat bagi inisiatif-inisiatif daerah, dengan menyatakan bahwa, "Salah satu capaian utama RAN PE 2020-2024 adalah munculnya upaya-upaya daerah untuk mencegah ekstremisme kekerasan. Dalam pencegahan, kita berpegang pada prinsip *"no one left behind"* - setiap orang memiliki peran, dan setiap peran itu penting. RAN PE adalah kepentingan bersama, bukan semata agenda keamanan nasional."

Usai diskusi, Wahid Foundation akan menyusun laporan tentang capaian, tantangan, dan pembelajaran dari implementasi RAD PE di daerah. Laporan ini akan mengusulkan rekomendasi strategis untuk penyusunan RAD PE 2025-2029 dan Peraturan Presiden terkait RAN PE 2025-2029.

Melibatkan dan Menjalin Ulang Kerja Sama

Sepanjang 29 Oktober hingga 6 November 2025, AIPJ3 menyelenggarakan serangkaian Lokakarya Strategi Keterlibatan dengan mitra masyarakat sipil dan pemerintah. Lokakarya ini menjangkau 264 peserta (121 peserta laki-laki dan 143 peserta perempuan) dari 48 organisasi masyarakat sipil/universitas dan 26 Kementerian/Lembaga untuk mengidentifikasi prioritas strategis bersama. Rangkaian lokakarya sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk menjalin ulang kerja sama dan bertukar wawasan.

Diskusi sepanjang lokakarya berlangsung dinamis dan kolaboratif — merefleksikan fondasi kerja sama yang kuat, yang mendasari implementasi program. Berdasarkan sesi-sesi diskusi mendalam, tim AIPJ3 telah mengembangkan enam rancangan Strategi Keterlibatan yang meliputi: Transparansi dan Akuntabilitas; Reformasi Peradilan Pidana; Hukum Komersial dan Perubahan Iklim; Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional; Akses terhadap Keadilan; dan Perempuan dalam Kepemimpinan.

Strategi-strategi ini bertujuan agar AIPJ3 mempertajam fokus kebijakan, memastikan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan selaras dan saling memperkuat, serta memandu implementasi yang adaptif sepanjang durasi program. Dokumen-dokumen

ini juga akan menjadi dasar bagi Rencana Kerja Tahunan AIPJ3 (yang akan jatuh tempo pada Februari 2026) dan akan diperbarui secara berkala melalui sesi refleksi bersama mitra-mitra secara partisipatif.



Diskusi dengan peserta masyarakat sipil dalam sesi Transparansi dan Akuntabilitas



Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto dalam sesi PVE bersama Manager Strategi PVE AIPJ3 Afnia Sari



Manajer Strategi Akses Keadilan AIPJ3, Theodora Putri, memfasilitasi diskusi dengan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil

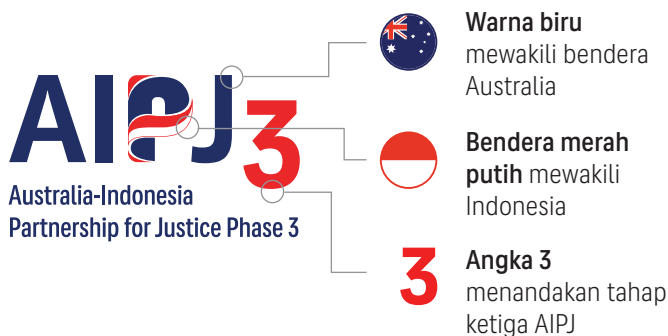


Tim The Asia Foundation dan anggota organisasi masyarakat sipil dalam diskusi selama sesi Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Tahap Baru, Tampilan Baru

AIPJ3 telah meluncurkan logo dan elemen desain yang diperbarui sebagai bagian dari identitas program pada November 2025. Proses pembaruan ini melibatkan kolaborasi erat dan masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Australia.

Pembaruan ini menandai babak awal AIPJ3, yang memadukan cara pandang baru sekaligus apresiasi terhadap konsistensi narasi identitas kemitraan yang kuat dan langgeng antara Australia dan Indonesia di sektor keadilan dan keamanan, yang akan merayakan 15 tahun kebersamaannya pada Mei 2026.



Logo baru melambangkan kemitraan bilateral terpercaya di sektor keadilan dan keamanan yang telah terjalin selama 15 tahun. Akronim "AIPJ" berada di posisi yang lebih tinggi, melambangkan

kekuatan dan kepercayaan. Angka tiga "3" - yang menandakan tahap ketiga - berada di bawahnya, mencerminkan keberlanjutan dan pertumbuhan. Warna biru, merah, dan putih pada huruf P mewakili bendera kedua negara, merefleksikan komitmen bersama terhadap keadilan dan keamanan.

Pola dekoratif baru terinspirasi dari batik parang, salah satu motif paling ikonik dan abadi di Indonesia. Para sejarawan menelusuri asal-usul desain mencatat Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram pada abad ke-16, yang konon merancang motif ini setelah mengamati deburan ombak Laut Jawa Selatan – simbol kesinambungan, semangat, dan tekad.



Dalam konteks AIPJ3, inspirasi desain parang merepresentasikan kekuatan dan kegigihan pemerintah dan mitra masyarakat sipil dalam berkolaborasi mengatasi tantangan keadilan dan mewujudkan kesetaraan.

SALAM HANGAT DARI TIM KAMI – anggota baru hingga 17 Oktober 2025



Kiri-kanan (belakang):

- Herni Sri Nurbayanti, Strategy Manager Women in Leadership, Gender Equity Team
- Raditya Tirta, Management Information System Manager, Quality and Learning Team
- Titi Pramesti, HR & Office Manager, Operations Team

Kiri-kanan (depan):

- Nila Dini Haryanti, Activity Coordinator, Preventing Violent Extremism
- Shinta Daryuni Rachman, Activity Coordinator, Women in Leadership
- Rita Nurhasanah, Research Analyst, Monitoring, Evaluation and Learning Team



Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 | email: aipj.info@aipj.or.id
The Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) is a joint initiative between Australian and Indonesian Governments and implemented by DT Global